

PENDAHULUAN

Fenomena tindak kekerasan sudah muncul sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di masyarakat sejak lama. Menurut World Health Assembly, dampak dari tindak kekerasan tidak hanya dari segi cedera fisik tetapi juga psikologi, sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan korban lainnya (Krug dkk., 2002). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan banyak jenis kekerasan, termasuk pelecehan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan remaja (Krug dkk., 2002). Sudah sangat banyak orang yang menjadi korban kekerasan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai penelitian membuktikan bahwa perempuan berisiko lebih tinggi menjadi korban berbagai jenis kekerasan. Data menunjukkan bahwa 35% wanita di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik dan seksual pasangan intim atau kekerasan seksual non-pasangan. Perempuan sebagai korban dalam banyak bentuk kekerasan merujuk pada istilah kekerasan berbasis gender (KBG). Ruang lingkup kekerasan berbasis gender mencakup perilaku yang merugikan perempuan atau anak perempuan seperti penganiayaan istri, kekerasan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan, prostitusi paksa, dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan dan juga pelecehan verbal seperti paksaan atau perampasan dan penghinaan yang mengancam jiwa (Heise dkk., 2002).

Selain itu, istilah lain dari kekerasan dalam suatu hubungan yang dikenal sebagai hubungan pasangan intim (IPV) memiliki definisi yang mirip dengan KBG, namun dalam konteks IPV, pelecehan dapat dialami baik terhadap pria maupun wanita antara pasangan yang sudah menikah atau belum menikah. Ada banyak aspek yang menyebabkan kekerasan di antara pasangan. Bisa melalui aspek sosial, interpersonal, bahkan budaya. Kekerasan hubungan intim pasangan telah menjadi isu sosial di masyarakat saat ini. Perhatian utama dari masalah ini adalah dampak pada status sosial ekonomi, fisik dan kesejahteraan kesehatan, seperti stres, kecemasan, depresi, dan trauma yang dapat menyebabkan PTSD. Dengan jumlah yang terus bertambah, penting untuk mengkaji penyebab signifikan dari masalah untuk menemukan dampak yang lebih pendek dan panjang kemudian menentukan intervensi terapeutik yang tepat berdasarkan kebutuhan dan tradisi.

Rencana intervensi yang tepat penting untuk efek jangka panjang pada korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai intervensi khusus dengan mempertimbangkan budaya. Beberapa peneliti menemukan bahwa intervensi psikososial adalah rencana perawatan terbaik bagi para korban untuk mengatasi trauma mereka. Selain itu, peran penyedia layanan untuk mempertimbangkan bagaimana kesehatan perilaku dan kesejahteraan emosional diakui dalam komunitas tempat mereka bekerja. Dengan kata lain, mereka mempertimbangkan norma budaya dan memastikan implementasi intervensi yang lebih tahan lama. Penelitian yang dilakukan oleh O'Brien dan Macy (2016) menunjukkan bahwa budaya yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda untuk membuat klien merasa nyaman dan mengatasi trauma mereka dengan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan korban. Sebagai contoh, banyak penelitian yang dilakukan di China mengenai rencana intervensi terhadap korban IPV menggambarkan bahwa intervensi difokuskan pada intervensi yang berfokus pada advokasi, sedangkan sebuah penelitian di Amerika Serikat lebih fokus pada intervensi pemberdayaan (O'Brien & Macy, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan IPV korban dalam budaya yang berbeda berbeda satu sama lain. Perlu kajian lebih lanjut untuk membuktikan prediksi tersebut. Ia juga berpendapat bahwa tingkat keparahan kekerasan dan kemungkinan terulangnya kembali memiliki cara penanganan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji perempuan sebagai korban kekerasan pada pasangan